
Peran UPT-BP2MI DIY Dalam Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga

Dwi Hartanto

¹Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
email: dwihartanto85@mail.ugm.ac.id

Edy Suandi Hamid

²Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
email: edy_suandi_hamid@ugm.ac.id

Muhammad Supraja

³Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
email: muhammad_supraja@ugm.ac.id

Dikirim; 17-03-2022; Direvisi; 28-04-2022; Diterima; 17-05-2022

ABSTRACT

This study aimed to analyzed the role of UPT-BP2MI DIY in empowering PMI Purna and analyzed its implications for family economic resilience. This study used the theory of role, empowerment and the theory of family economic resilience.

This research approach was a qualitative research with descriptive exploratory method with data collection techniques used were observation, interviews, documentation and literature. The informants in this study amounted to 13 people consist of employees of UPT-BP2MI DIY and PMI Purna. Data analysis used was data categorization, data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of this study indicated that through the empowerment of PMI Purna organized by UPT-BP2MI DIY it had implications for increasing insight, skills, and abilities to created independence and economic resilience for PMI Purna families. In its implementation, there were still obstacles faced by UPT-BP2MI DIY and PMI Purna for implementing the results of empowerment. The empowerment activities carried out had implications for the economic resilience of PMI Purna's families, which could be seen through four aspects, namely: (1). Family residence, (2). Family income that had exceeded the Provincial Minimum Wage (UMP) of DIY Province of Rp. 1,765,000 rupiah, this was one of the strongest aspects of determining the implications of PMI Purna's family economic resilience, (3). Financing the education of children who did not drop out of school in the 12-year compulsory education, and (4). Family financial guarantees in the form of bank products, non banks and others.

Keywords: Role of Technical Implementation Unit-BP2MI; Indonesian Migrant Worker; Family Economic Resilience.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran UPT-BP2MI Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam pemberdayaan PMI Purna dan menganalisis implikasinya terhadap ketahanan ekonomi keluarga. Pada Penelitian ini teori yang digunakan adalah teori peran, pemberdayaan dan teori ketahanan ekonomi keluarga.

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yang bersifat eksploratif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan kepustakaan. Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 13 orang terdiri dari pegawai UPT-BP2MI DIY dan PMI Purna. Analisis data yang digunakan adalah kategorisasi data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa melalui pemberdayaan PMI Purna yang diselenggarakan oleh UPT-BP2MI DIY berimplikasi terhadap peningkatan wawasan, keterampilan, serta kemampuan untuk menciptakan kemandirian dan ketahanan ekonomi keluarga PMI Purna. Pada Pelaksananya masih terdapat kendala yang dihadapi oleh UPT-BP2MI DIY maupun PMI Purna untuk pengimplementasian hasil pemberdayaan. Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan memiliki implikasi terhadap ketahanan ekonomi keluarga PMI Purna, yang dilihat melalui empat aspek yaitu: (1). Tempat tinggal keluarga, (2). Pendapatan keluarga yang telah melebihi Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi DIY sebesar Rp. 1.765.000, ini merupakan salah satu aspek terkuat terhadap penentuan implikasi ketahanan ekonomi keluarga PMI Purna, (3). Pembiayaan pendidikan anak yang tidak sampai putus sekolah dalam wajib belajar 12 tahun, dan (4). Jaminan keuangan keluarga dalam bentuk produk bank, non bank dan lainnya.

Kata Kunci: Peran UPT-BP2MI; Pekerja Migran Indonesia Purna; Ketahanan Ekonomi Keluarga.

PENGANTAR

Terserapnya warga negara Indonesia menjadi pekerja migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri tidak semata-mata menyelesaikan masalah pengangguran yang ada di Indonesia. Dalam jangka pendek, bekerja sebagai pekerja migran mampu membantu PMI dan keluarganya mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Namun, apabila dilihat dalam jangka panjang, tentunya akan sulit untuk meningkatkan taraf hidup keluarga PMI tanpa adanya perencanaan serta pengelolaan keuangan yang matang. Hal ini dapat dilihat dari latar belakang kehidupan PMI yang sebagian besar merupakan masyarakat kurang mampu. Permasalahan ekonomi PMI apabila diamati merupakan sebuah siklus yang sulit untuk diubah.

Melalui observasi lapangan yang dilakukan menunjukkan bahwa banyak dari calon PMI (CPMI) tidak memiliki biaya untuk keperluan pelatihan, pembuatan paspor, visa, medical check up, tiket pesawat dan sebagainya, sehingga terpaksa harus meminjam uang yang tidak sedikit jumlahnya. Pada tahun awal, upah yang diterima PMI akan digunakan untuk membayar pinjaman untuk biaya keberangkatan. Tahun berikutnya, upah

akan digunakan untuk memenuhi kepentingan jangka pendek seperti kebutuhan rumah tangga, biaya pendidikan, perbaikan rumah, dan tidak jarang dipakai untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif. Hingga masa kontrak kerja berakhir, PMI tidak memiliki tabungan yang cukup untuk melanjutkan kehidupannya di Indonesia dan akhirnya memilih untuk kembali bekerja di luar negeri. Siklus inilah yang sering dialami oleh PMI di Indonesia. Berdasarkan fakta tersebut, maka sangat penting bagi pemerintah memberikan perlindungan terhadap permasalahan yang kerap dialami oleh PMI. Pemerintah perlu mengkaji dan menganalisis lebih dalam guna menemukan cara agar PMI tidak terjebak dalam siklus tersebut. Hal ini dapat dilakukan melalui pemberdayaan terhadap PMI Purna untuk menggali potensi yang dimiliki. Hal ini diperlukan agar PMI yang sudah kembali ke Indonesia tidak terus mengulang siklus pemenuhan kebutuhan hidup tanpa perencanaan jangka panjang.

Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap para Pekerja Migran Indonesia, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran

Indonesia telah berganti nama menjadi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan pemberdayaan terhadap PMI Purna. BP2MI melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah seluruh Indonesia telah melaksanakan kegiatan pemberdayaan terhadap para pekerja migran Indonesia.

BP2MI telah melaksanakan suatu program yang bertujuan agar PMI dan keluarganya tidak lagi terjebak pada siklus pemenuhan kebutuhan hidup yang terus berulang. Program pemberdayaan bagi PMI Purna dan keluarganya, diharapkan mampu mengubah nasib mereka dalam pengelolaan keuangan yang baik dan menumbuhkan jiwa wirausaha terampil. Program pemberdayaan BP2MI mengajak PMI Purna untuk dapat mengelola dan memanfaatkan remitansi yang diperoleh dari hasil bekerja di luar negeri. Berdasarkan data yang diperoleh dari BP2MI dan Bank Indonesia tahun 2019, jumlah remitansi dari PMI yang masuk ke Indonesia sangat tinggi, mencapai US\$ 11,43 miliar atau setara Rp. 165,2 triliun dan remitansi pada tahun 2020 hingga bulan September mencapai US\$ 7,11 miliar atau setara Rp. 102,8 triliun (hitungan kurs 1 US\$ = Rp. 14.451) (BP2MI, 2021)

BP2MI sejak tahun 2010 telah melaksanakan program pemberdayaan secara merata di berbagai daerah di Indonesia di bawah kantor Unit Pelayanan Teknis (UPT) BP2MI di berbagai provinsi dan telah menghasilkan wirausahawan baru yang tidak hanya meningkatkan taraf hidup perekonomiannya sendiri namun juga berdampak pengaruh terhadap roda perekonomian lokal di daerah dan bagi warga sekitar.

Data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyebutkan ratusan ribu PMI bekerja ke luar negeri setiap

tahunnya guna mencari penghasilan dan mengirimkan gajinya ke kampung halaman untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan untuk ditabung. Salah satu provinsi, yakni Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan data Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKO-TKLN) BP2MI menempati peringkat ke-12 dari 34 Provinsi di Indonesia pengirim PMI ke luar negeri (BP2MI, 2021) (Lihat Tabel 1).

Tabel 1
Jumlah Penempatan PMI Asal Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018-2020

No.	Tahun	Jumlah Penempatan PMI ke Luar Negeri
1.	2018	1.434
2.	2019	1.314
3.	2020	359
	Total	3.107

Sumber : BP2MI, 2021

Berdasarkan data tersebut, dapat dijelaskan bahwa pada periode tahun 2018 hingga tahun 2020, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah mencatat data penempatan PMI ke luar negeri sebanyak 3.107 PMI. Jadi, animo masyarakat DIY untuk bekerja ke luar negeri tetap ada terutama pada jabatan formal di negara-negara tertentu yang menjadi incaran warga. Hal ini sejalan dengan sabda Raja Keraton Daerah Istimewa Yogyakarta/Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X yang menyatakan bahwa warga DIY dipersilakan bekerja ke luar negeri, namun sebaiknya tidak bekerja sebagai pembantu rumah tangga atau *domestic helper*.

Selain data penempatan, juga diperoleh data keputugan PMI asal DIY pada tahun 2018 hingga tahun 2020 dengan jumlah angka sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.

Berdasarkan Tabel 2, jumlah keputugan PMI dari luar negeri ke DIY dalam kurun waktu tiga tahun terakhir mencapai 3.120

Tabel 2
Jumlah Kepulangan PMI Asal Provinsi DIY

No.	Tahun	Jumlah Kepulangan PMI
1.	2018	1.830
2.	2019	992
3.	2020	298
	Total	3.120

Sumber : UPT-BP2MI DIY, 2021

orang. Angka kepulangan PMI tersebut menjadi rujukan bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) BP2MI Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan program pemberdayaan bagi PMI Purna. Sementara penerimaan remitansi berdasarkan jumlah penempatan PMI asal DIY tahun 2016 sampai dengan 2019 ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3
Penerimaan Remitansi Berdasarkan Jumlah Penempatan PMI Asal Provinsi DIY tahun 2016 s.d 2019.

NO.	Tahun	Remitansi/ tahun	Negara Penempatan
1.	2016	465 milyar	USA, Arab Saudi, Korea Selatan, Taiwan, Singapura, Brunei, Hongkong, Malaysia, dan lainnya
2.	2017	295 milyar	Arab Saudi, Korea Selatan, Taiwan, Singapura, Brunei, Jepang, Malaysia, Timur Tengah, USA, dan lainnya
3.	2018	271 milyar	Arab Saudi, Korea Selatan, Taiwan, Singapura, Brunei, Jepang, Malaysia, USA, dan lainnya
4.	2019	325 milyar	Arab Saudi, Korea Selatan, Taiwan, Singapura, Brunei, Hongkong, Jepang, Malaysia, USA, dan lainnya

Sumber : UPT-BP2MI DIY, 2021

Data remitansi tersebut menjadi rujukan pula bagi UPT-BP2MI DIY untuk terus melaksanakan dan melanjutkan kegiatan pemberdayaan terhadap para PMI Purna dan keluarganya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan pemberdayaan kepada para PMI Purna telah dilaksanakan oleh UPT-

BP2MI DIY sejak tahun 2010 hingga 2018, telah tercatat sebanyak 1.165 PMI Purna telah dilatih dengan berbagai jenis pelatihan kewirausahaan maupun praktek produksi.

Adapun jenis pelatihan yang diselenggarakan antara lain pelatihan kewirausahaan, edukasi keuangan, pariwisata, ketahanan pangan serta ekonomi kreatif. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan minat serta potensi wirausaha PMI agar dapat mengelola upah selama bekerja di luar negeri secara maksimal serta dapat memperoleh manfaat jangka panjang.

Berdasarkan data yang diperoleh tersebut, peneliti melihat adanya urgensi untuk menganalisis pelaksanaan program pemberdayaan PMI Purna yang diselenggarakan oleh UPT-BP2MI DIY. Selain itu, penting untuk mengetahui implikasi dari program pemberdayaan PMI Purna terhadap ketahanan ekonomi keluarga. Program pemberdayaan ini dapat dikatakan berhasil apabila telah meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga PMI Purna.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Peneliti mengumpulkan informasi yang apa adanya sesuai dengan fakta, sifat dan fenomena antar hubungan yang ditemui di lapangan dengan mendeskripsikan secara rinci bagaimana kondisi objek penelitian secara alamiah kaitannya dengan keadaan sebelum dan setelah dilaksanakannya program Pemberdayaan bagi PMI Purna dan keluarganya. Menggunakan metode tersebut, maka peneliti mendapatkan data secara utuh dan dapat dideskripsikan dengan jelas sehingga hasil penelitian benar-benar sesuai dengan data di lapangan.

Melalui dasar pemikiran tersebut, beberapa masalah yang ingin dicari pemecahannya dalam penelitian ini adalah

bagaimana pemberdayaan yang dilakukan oleh UPT-BP2MI DIY terhadap pekerja migran Indonesia purna dan implikasinya terhadap ketahanan keluarga.

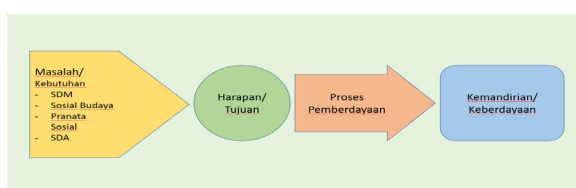
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif Miles-Huberman dalam Bungin (2001) dimana peneliti bergerak di antara 4 sumbu proses yaitu : pengumpulan data yang diperoleh melalui hasil observasi, wawancara dan beberapa dokumen. Selanjutnya, reduksi data yakni proses penajaman, dan penggolongan data agar lebih mudah dianalisis. Kemudian penyajian data serta penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Konsep dan Mekanisme Pemberdayaan PMI Purna

Konsep pemberdayaan PMI Purna merupakan konsep yang mengandung nilai sosial dan ekonomi guna mewujudkan kemandirian PMI Purna. Konsep pemberdayaan PMI Purna tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) masyarakat PMI Purna, melainkan menyediakan mekanisme untuk mencegah siklus permasalahan ekonomi berulang yang dihadapi oleh PMI. Tujuan dari pemberdayaan PMI Purna ini adalah untuk meningkatkan taraf hidup PMI Purna dan keluarganya, sebagaimana diuraikan dalam kerangka pemberdayaan (Lihat Gambar 1).

Gambar 1
Kerangka Berpikir Pemberdayaan PMI Purna

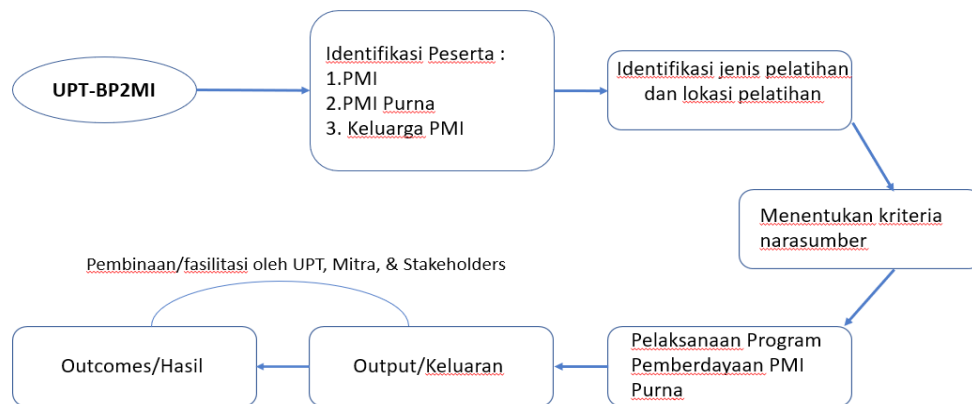


Sumber : Olahan Peneliti, 2021.

Gambar 1 tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan PMI Purna bertolak dari permasalahan masyarakat PMI Purna yang mengalami kesulitan dalam meningkatkan taraf hidupnya karena tidak memiliki perencanaan dan pengelolaan keuangan yang matang, dengan latar belakang kehidupan yang sebagian besar merupakan masyarakat kurang mampu. Oleh karena itu, dibutuhkan pemberdayaan yang dimaksudkan untuk memberikan edukasi, keterampilan dan motivasi bagi para PMI Purna. Pemberdayaan dimaksud yakni melalui kegiatan wirausaha, investasi serta usaha produktif lainnya dengan memanfaatkan penghasilan yang diperoleh selama bekerja di luar negeri, potensi diri, maupun lingkungan sekitar (sumberdaya alam dan lain-lain). Diharapkan PMI Purna yang mengikuti pemberdayaan dapat mandiri dan berdaya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan baik bagi dirinya, keluarga, maupun masyarakat sekitarnya. Hal penting lainnya, agar PMI yang bersangkutan tidak kembali bekerja ke luar negeri meninggalkan keluarganya di kampung halaman.

Pelaksanaan pemberdayaan PMI Purna dan keluarganya telah diatur dalam Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan PMI, PMI Purna dan Keluarganya. Peraturan tersebut masih menjadi dasar pedoman hingga saat ini dikarenakan belum ada peraturan pengganti sejak Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) berubah menjadi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Namun, pada bulan Juni 2021, Kepala BP2MI, Benny Rhamdani mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 06 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya.

Gambar 2
Mekanisme Pelaksanaan Pemberdayaan PMI Purna



Sumber : BP2MI, 2021

Dalam surat edaran tersebut dijelaskan mekanisme pelaksanaan pemberdayaan PMI Purna, dengan alur sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.

Pelaksanaan Pemberdayaan PMI Purna : Target dan Realisasi

Pemberdayaan PMI Purna telah diamanatkan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia pada pasal 47 huruf (f) dimana dijelaskan bahwa Kepala Badan sebagai pelaksana kebijakan bertugas untuk melakukan pemberdayaan sosial dan ekonomi Pekerja Migran Indonesia Purna. Pemberdayaan PMI Purna yang dilaksanakan oleh BP2MI diawali dari keprihatinan BP2MI ketika melihat PMI Purna yang pulang dari luar negeri, mereka memiliki uang banyak, namun karena faktor pendidikan dan pengalaman yang masih minim sehingga uang tersebut hanya mereka pergunakan untuk kegiatan konsumtif. Oleh karena itu, BP2MI melaksanakan kegiatan pemberdayaan kepada para PMI Purna. Kegiatan ini dimaksudkan agar mereka dapat memanfaatkan hasil usahanya untuk

menjadi berdaya. Berdasarkan hal tersebut, pemberdayaan PMI Purna sangat penting dilaksanakan bagi para PMI Purna guna mengelola penghasilannya dari luar negeri untuk dapat dimanfaatkan demi kesejahteraan diri dan keluarganya sekembalinya ke Indonesia, dan agar PMI yang bersangkutan tidak bekerja kembali ke luar negeri meninggalkan keluarganya di Indonesia.

BP2MI sebagai instansi yang menaungi pekerja migran Indonesia (PMI) telah menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan terhadap PMI Purna di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Indonesia, dari 23 UPT-BP2MI, salah satunya terdapat di Provinsi DIY. UPT-BP2MI DIY sebagai perpanjangan tangan dari BP2MI telah menyelenggarakan kegiatan dan program pemberdayaan pekerja migran Indonesia purna dan keluarganya. Tentunya kegiatan UPT-BP2MI tidak terlepas dari perencanaan dan penentuan anggaran dari induk instansinya yakni BP2MI yang berada di pusat Ibukota Jakarta. Berikut data target dan realisasi kegiatan pemberdayaan PMI Purna pada UPT-BP2MI di daerah pada tahun 2021 (Lihat Tabel 4).

Tabel 4
Target dan Realisasi Kegiatan Pemberdayaan PMI Purna pada UPT-BP2MI se-Indonesia

No.	DAERAH	REVISI I	REVISI II	REVISI III	REALISASI	SISA
1	UPT-JAKARTA	220	120	40	19	21
2	UPT BANDUNG	420	200	100	40	60
3	UPT SEMARANG	320	180	180	180	0
4	UPT-YOGYAKARTA	180	80	40	0	40
5	UPT- SURABAYA	420	220	100	59	41
6	UPT- BANDA ACEH	100	40	0	0	0
7	UPT-MEDAN	100	40	0	0	0
8	UPT-PADANG	120	60	1	0	1
9	UPT-LAMPUNG	140	80	20	0	20
10	UPT- KENDARI	40	20	0	0	0
11	UPT- PEKANBARU	80	40	20	20	0
12	UPT-PALU	80	40	20	0	20
13	UPT- PALEMBANG	40	40	20	0	20
14	UPT- PONTIANAK	140	60	40	0	40
15	UPT- BANJARBARU	120	60	60	60	0
16	UPT- NUNUKAN	60	20	20	0	20
17	UPT- MAKASSAR	80	80	80	0	80
18	UPT- MATARAM	340	160	140	20	120
19	UPT- KUPANG	260	120	0	0	0
20	UPT- TJ PINANG	60	1	1	0	1
21	UPT- SERANG	400	200	60	0	60
22	UPT- DENPASAR	60	20	0	0	0
23	UPT- MANADO	240	160	40	0	40
		4.020	2.041	982	398	584

Sumber : BP2MI, 2021.

Berdasarkan Tabel 4 tersebut, dapat diketahui bahwa kegiatan pemberdayaan PMI Purna di UPT-BP2MI seluruh Indonesia terus mengalami penyusutan jumlah kegiatan, ditandai dengan adanya revisi I, II dan III. Revisi tersebut terkait dengan *refocusing* anggaran pada program pemberdayaan PMI Purna yang akan atau telah diselenggarakan di UPT-BP2MI di seluruh Indonesia yang menyusut akibat dari anggaran yang difokuskan pada kegiatan berkaitan dengan penanggulangan pandemi covid-19. Hal ini mengakibatkan penundaan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan terhadap PMI Purna yang diselenggarakan di UPT-BP2MI di seluruh Indonesia.

Pada UPT-BP2MI DIY, pelaksanaan kegiatan pemberdayaan PMI Purna telah

diselenggarakan setiap tahunnya secara rutin dan telah memperoleh capaian signifikan sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 5.

Tabel 5
Kegiatan Pemberdayaan PMI Purna oleh UPT-BP2MI DIY periode 2007 hingga 2019

No.	Tahun	Jumlah Paket	Jumlah Orang
1.	2007-2010	-	300
2.	2011	2	50
3.	2012	2	50
4.	2013	2	50
5.	2014	2	50
6.	2015	4	100
7.	2016	2	50
8.	2017	7	175
9.	2018	12	300
10.	2019	2	40
	TOTAL	35	1.165

Sumber : UPT-BP2MI DIY, 2021

Tabel 6
Capaian Signifikan Pemberdayaan PMI oleh UPT-BP2MI DIY

No.	Tahun Periode	Capaian Signifikan UPT-BP2MI DIY
1.	2007-2010	Pemberian materi terkait edukasi keuangan dan kewirausahaan, tahun ini merupakan tahun mengubah paradigma para PMI Purna dari seorang pekerja migran menjadi seorang wirausahawan (entrepreneur). UPT-BP2MI DIY dalam kurun waktu tersebut berfokus terhadap pembinaan para PMI Purna agar tidak berperilaku konsumtif dan memanfaatkan tabungannya untuk kepentingan produktif. Hal ini tidak mudah mengingat banyak PMI berperilaku boros seperti menyelenggarakan pesta pernikahan dan ulang tahun mewah, membeli kendaraan roda empat, atau membangun rumah. UPT-BP2MI fokus melakukan pendekatan personal, pendampingan, dan pembekalan kepada para PMI Purna.
2.	2010-2012	Peningkatan pada periode tahun ini dimana PMI Purna diberikan pelatihan keterampilan. Tahun ini merupakan kurun waktu bagi UPT-BP2MI memasukkan edukasi keuangan dan kewirausahaan diawal sebelum PMI berangkat bekerja ke luar negeri. Edukasi yang diberikan meliputi tabungan dan pengelolaan hasil kerja. Edukasi diberikan sebelum PMI berangkat bekerja ke luar negeri.
3.	2012-2019	Peningkatan periode waktu ini terlihat dari kegiatan UPT-BP2MI menyelenggarakan empat bidang program pemberdayaan meliputi Ketahanan pangan, Industri ekonomi kreatif, Industri pariwisata dan Industri jasa. UPT telah menjalin kerjasama dengan berbagai mitra dan stakeholders. Sebanyak 9 (sembilan) paguyuban PMI Purna telah dibentuk, serta menginisiasi kerjasama dengan Universitas Ahmad Dahlan.
4.	2020	Penguatan pemberdayaan ditandai dengan dibentuknya Forum Komunikasi (Forkom) Pengusaha PMI Purna oleh Sekretaris Utama BP2MI. Forkom ini sebagai penguatan jejaring pengusaha PMI Purna. Periode ini ditandai secara konkrit dengan pengelolaan modular atau etalase di bandara Soekarno Hatta yang menjajakan produk dari PMI Purna DIY.

Sumber : Olahan Peneliti, 2021

Secara lebih rinci tentang capaian signifikan pemberdayaan PMI oleh UPT-BP2MI DIY dapat ditunjukkan pada Tabel 6.

Tabel 6 tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pemberdayaan PMI Purna telah dilaksanakan sejak tahun 2007 namun hanya sebatas pemberian materi. Kemudian sejak tahun 2010 hingga 2019 telah ditambahkan praktik berupa pelatihan keterampilan. Pelatihan keterampilan ini disesuaikan dengan keinginan PMI Purna guna peningkatan kapasitas. Pemberian pelatihan pemberdayaan diawali dengan mewawancarai terlebih dahulu PMI Purna terkait jenis pelatihan yang dibutuhkan, untuk kemudian ditindaklanjuti. Pelatihan keterampilan pada tahun 2010 dimulai dari pelatihan produk olahan dan kuliner serta manajemen usaha. Pemberdayaan bagi PMI Purna tidak hanya saat pelatihan saja, tetapi juga dilakukan pendampingan selama di lapangan terutama kegiatan kewirausahaan. Dari tahun 2007 hingga 2019, tercatat sejumlah 1.165 PMI Purna telah mengikuti kegiatan

pemberdayaan yang diselenggarakan oleh UPT-BP2MI DIY.

Pelaksanaan pemberdayaan PMI Purna dilaksanakan selama 6 (enam) hari yang terdiri dari pemberian materi teori dan kegiatan praktek, dengan melibatkan mitra serta *stakeholders* terkait. Dalam kegiatan pemberdayaan ini terdapat 2 (dua) jenis pelatihan, yaitu *pertama*, pelatihan kewirausahaan, yang ditujukan bagi PMI Purna dan keluarganya yang mempunyai minat untuk berwirausaha. Program wirausaha mandiri ini menitikberatkan pada 4 (empat) bidang/program, yaitu (1). Ketahanan pangan contohnya peternakan, perikanan, perkebunan; (2). Industri ekonomi kreatif, contohnya kerajinan dan industri kreatif lainnya; (3). Industri pariwisata, contohnya kuliner, travel guide; dan (4). Industri jasa, contohnya keterampilan las, menjahit, service elektronik, bengkel, salon, dan lainnya.

UPT-BP2MI DIY merupakan lembaga yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan

secara kontinyu kepada masyarakat khususnya PMI Purna sejak tahun 2007 hingga 2019 dan terhenti sementara karena pandemi covid-19. Sesuai teori pemberdayaan Hopson dan Scally dalam Adi (2012), UPT-BP2MI DIY terus melakukan kegiatan pemberdayaan dengan proses berkesinambungan dalam jangka panjang yang sampai saat ini terus mendampingi PMI Purna yang sebelumnya telah memiliki usaha maupun merintis dari awal, sehingga PMI Purna memiliki keinginan dan wawasan untuk berwirausaha. Komunitas dengan nama paguyuban PMI Purna di wilayah DIY pun telah dibentuk oleh UPT-BP2MI DIY dengan pendekatan wilayah dan karakteristik usahanya masing-masing. Pemberdayaan terhadap PMI Purna dilaksanakan dengan menyentuh tiap individu dari PMI Purna. Hal yang dilakukan UPT-BP2MI DIY mengupayakan proses pemberdayaan terus berjalan. Proses tersebut berangkat dari pengalaman individu dan bukan proses yang berhenti pada saat tertentu. Pemberdayaan terhadap PMI Purna ini telah dilaksanakan sejak tahun 2007 hingga 2019 baik terhadap PMI Purna yang telah memiliki usaha ataupun yang memulai usaha. Peran UPT-BP2MI DIY secara konkrit telah melahirkan paguyuban dan forum komunikasi (forkom) pengusaha PMI Purna. Jadi hal tersebut sesuai dengan teori pemberdayaan Hopson dan Scally dalam Adi (2012). Pengalaman yang ditanamkan kepada individu, akan berlaku juga pada level kelompok, dimana hasil ataupun proses pemberdayaan itu akan eksis dan ajeg selama komunitas yang telah dibentuk tersebut terus bergerak dan aktif untuk memberdayakan diri mereka.

Setelah paguyuban PMI Purna dibentuk dan mengupayakan kegiatan PMI Purna tetap aktif dalam paguyuban tersebut, maka kegiatan selanjutnya adalah evaluasi yang dilakukan

oleh UPT-BP2MI setiap triwulan. Evaluasi dilakukan dengan cara mendata jumlah dan personel PMI Purna yang usahanya telah berjalan dan maju.

Sebagai bentuk konkrit kegiatan pemberdayaan agar berkelanjutan, pada tahun 2019 dikumpulkan sebanyak 80 orang PMI Purna untuk diberikan pelatihan digital marketing oleh UPT-BP2MI DIY. Pada tahun yang sama di 2019, UPT-BP2MI juga telah melakukan kerjasama dengan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta untuk pendampingan wirausaha pemula bagi PMI Purna yang terkena krisis dan kebangkrutan. Tujuan dari kerjasama ini untuk memperoleh wawasan serta ide-ide baru dalam melakukan usaha bersama dalam satu wadah yang saling mengisi di antara pengusaha PMI Purna DIY. Kegiatan terbaru kerjasama dengan Universitas Ahmad Dahlan bagi PMI Purna yakni membentuk Koperasi Syariah dan mengadakan pelatihan manajemen koperasi bagi pengurus dan anggota koperasi yang terdiri dari PMI Purna di wilayah DIY. Koperasi Syariah PMI Purna ini digagas tahun 2020 dan saat ini baru dimulai. Pelatihan terakhir diselenggarakan pada 25 Agustus 2021, berlokasi di Gedung Kantor Urusan Bisnis (KUBI) Kampus Universitas Ahmad Dahlan Lt.3, menghadirkan narasumber dosen ekonomi bisnis dari Universitas Ahmad Dahlan sekaligus praktisi manajemen koperasi. Dalam pelatihan ini PMI Purna diberi wawasan seputar pengelolaan kegiatan koperasi, manajemen koperasi, dan tantangan di dalamnya (Lihat Gambar 3).

Kendala Pelaksanaan Program Pemberdayaan PMI Purna

Kegiatan Pemberdayaan PMI Purna tentunya memiliki beberapa kendala yang

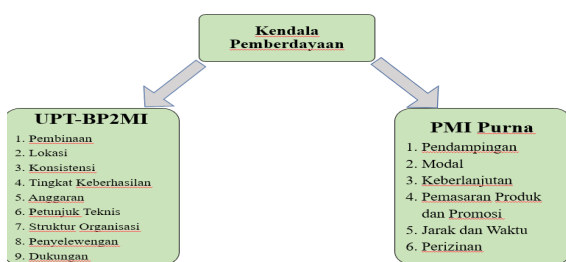
Gambar 3
Pelatihan Koperasi Syariah Bagi PMI Purna \ Di Universitas Ahmad Dahlan



Sumber : Foto Dokumentasi Peneliti, 25 Agustus 2021.

menghambat proses pelaksanaan. Kendala tersebut baik dari sisi UPT-BP2MI DIY selaku penyelenggara dalam upaya memberikan pelatihan pemberdayaan. Kendala lainnya juga dihadapi oleh PMI Purna DIY dalam mengimplementasikan hasil yang diperoleh dari kegiatan pemberdayaan (Lihat Gambar 4).

Gambar 4
Kendala Dalam Pelaksanaan Pemberdayaan yang Dihadapi UPT-BP2MI DIY dan PMI Purna



Sumber : Olahan Peneliti, 2021.

Implikasinya Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga

Ketahanan ekonomi keluarga merupakan suatu kondisi dinamik keluarga yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan keluarga dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan serta

gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat membahayakan kelangsungan kehidupan ekonomi keluarga. Kondisi ketahanan ekonomi keluarga dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain tempat tinggal, pendapatan, pembiayaan pendidikan anak dan jaminan keuangan keluarga (BPS, 2016).

Kriteria Ketahanan Ekonomi Keluarga

Keluarga merupakan unit/institusi/ sistem sosial terkecil dalam masyarakat yang beranggotakan sekelompok orang atas dasar hubungan perkawinan, pertalian darah, atau adopsi yang tinggal bersama dalam suatu rumah tangga. Berdasarkan Katalog Pembangunan Ketahanan Keluarga (2016) yang disusun oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA), dimensi ketahanan ekonomi keluarga dijabarkan melalui 4 (empat) aspek dan 7 (tujuh) faktor, yakni (1). Aspek Tempat Tinggal Keluarga diukur berdasarkan 1 (satu) faktor yaitu: Kepemilikan Rumah, (2). Aspek Pendapatan Keluarga diukur berdasarkan 2 (dua) faktor yaitu: Pendapatan Perkapita Keluarga, dan Kecukupan Pendapatan Keluarga, (3). Aspek Pembiayaan Pendidikan Anak diukur berdasarkan 2 (dua) faktor yaitu: Kemampuan Pembiayaan Pendidikan Anak, dan Keberlangsungan Pendidikan Anak, (4). Aspek Jaminan Keuangan Keluarga diukur berdasarkan 2 (dua) faktor yaitu: Tabungan Keluarga, dan Jaminan Kesehatan Keluarga.

Dari hasil wawancara peneliti terkait implikasi pemberdayaan PMI Purna terhadap ketahanan ekonomi keluarga, maka dapat dikatakan sudah memenuhi syarat dan kriteria ketahanan ekonomi keluarga yang diukur dari empat aspek yaitu (1). Kemampuan PMI Purna

mengelola ekonominya dalam rumah tangga sehingga bisa mempunyai tempat tinggal sendiri, karena rumah merupakan kebutuhan yang paling dasar bagi setiap keluarga, (2). PMI Purna dapat menyekolahkan anak tidak sampai putus sekolah, (3). PMI Purna memiliki pendapatan ekonomi keluarga yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari, dan (4). Memiliki jaminan keuangan yang berupa tabungan.

Implikasi Pemberdayaan PMI Purna terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga dalam Konteks Ketahanan (*Resilience*)

Ketahanan (*resilience*) dimaknai sebagai kapasitas sistem untuk menyerap gangguan dan mengatur ulang ketika terjadi perubahan sehingga dasarnya tetap mempertahankan fungsi, struktur, identitas dan umpan balik yang sama. Ketahanan membahas dinamika dan pengembangan sistem sosial-ekologis yang kompleks. Empat aspek penting dalam ketahanan (*resilience*), yaitu (1). Absorpsi yakni kemampuan untuk menahan, dan meredam guncangan, (2). Adaptasi merupakan bagian dari resiliensi. Ini mewakili kapasitas untuk menyesuaikan respon terhadap perubahan, (3). Transformasi yakni kapasitas untuk menciptakan sistem baru yang fundamental ketika struktur ekologi, ekonomi, atau sosial membuat sistem yang ada tidak dapat dipertahankan, dan (4). Strategi untuk keberlanjutan (*sustainability*) yakni memiliki kondisi yang tahan, mampu beradaptasi dan bertransformasi dari guncangan sehingga dapat berkelanjutan untuk menahan guncangan selanjutnya (Armawi, 2020).

Pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan

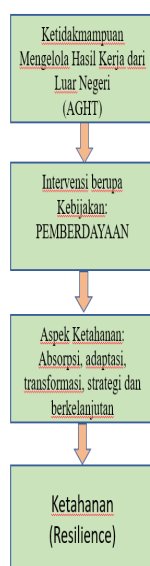
berupaya untuk mengembangkan potensi menjadi tindakan nyata. Pemberdayaan harus bersifat berkelanjutan (Hendriyanto, 2014). Pemberdayaan juga dimaknai sebagai suatu strategi yang dilakukan guna meningkatkan kualitas social, ekonomi dan budaya (Anwar, 2020).

UPT-BP2MI hadir sebagai sebuah lembaga yang salah satu tugas dan fungsinya ialah melaksanakan pemberdayaan bagi pekerja migran Indonesia purna. Urgensi pelaksanaan pemberdayaan bagi PMI Purna ialah memberikan edukasi dan keterampilan bagi PMI Purna untuk mampu mengelola sumber daya keuangan. Hal ini dianalisis berdasarkan data yang diperoleh UPT-BP2MI DIY bahwa sering terjadi perilaku konsumtif dari PMI Purna dalam memanfaatkan hasil jerih payah dari luar negeri, sehingga tidak dapat digunakan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pada aspek ketahanan (*resilience*) maka pelaksanaan kegiatan pemberdayaan yang diselenggarakan oleh UPT-BP2MI DIY merupakan bagian dari intervensi kebijakan yang dilaksanakan dalam bentuk edukasi keuangan dan pelatihan kewirausahaan. Pemberdayaan menyentuh individu PMI Purna. Ketahanan individu dari PMI Purna dapat dilihat dari beberapa aspek ketahanan, yakni absorpsi (*absorption*) terlihat dari individu PMI Purna yang mampu menahan dan meredam guncangan yang terjadi baik dari diri maupun lingkungan. Guncangan dimaksud yakni meskipun PMI sudah tidak lagi mendapatkan gaji dari luar negeri, namun dituntut untuk tetap mampu menghidupi diri dan keluarganya. Absorpsi ini erat kaitannya dengan kemampuan untuk menahan guncangan agar kondisi tetap stabil dan seimbang saat dilanda guncangan.

Selanjutnya, adaptasi (*adaptation*), pada aspek ini PMI Purna menghadapi tantangan untuk mengubah paradigma dan melakukan penyesuaian dari seorang pekerja migran menjadi seorang wirausahawan (*entrepreneur*). Hal ini merupakan masa adaptasi bagi PMI Purna karena dituntut untuk tidak berperilaku konsumtif dan mampu memanfaatkan tabungan yang diperoleh untuk kepentingan produktif. Penyesuaian terhadap perubahan ini juga meliputi kemampuan untuk menyerap pengetahuan dan keterampilan yang diberikan selama mengikuti kegiatan pemberdayaan. Berikutnya, transformasi (*transformation*), yakni PMI Purna akhirnya mampu menyesuaikan diri dan memiliki kemampuan untuk mengubah diri dari sebelumnya sebagai pekerja migran menjadi seorang wirausahawan. Transformasi berkaitan dengan kemampuan mengubah diri, hal tersebut dilihat dari kemampuan PMI Purna memperoleh penghasilan di dalam negeri sehingga yang bersangkutan tidak lagi kembali bekerja ke luar negeri (Lihat Gambar 5).

Gambar 5
Ketahanan (*Resilience*) Pemberdayaan UPT-BP2MI



Sumber : Olahan Peneliti, 2021.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap 9 orang informan PMI Purna yang 6 orang di antaranya adalah Ketua Paguyuban PMI Purna DIY dan 3 orang PMI Purna yang kesemuanya merupakan pelaku wirausaha. Diperoleh data bahwa kesembilan PMI Purna telah memenuhi dimensi ketahanan ekonomi keluarga, dimana PMI Purna telah memiliki tempat tinggal untuk keluarganya, memiliki rumah di kampung halamannya. Para PMI Purna memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga yang dilihat dari jumlah pendapatan yang diperoleh, dan kecukupan pendapatan bagi keluarga. Aspek selanjutnya adalah PMI Purna memiliki kemampuan dalam membiayai pendidikan anak dan keberlangsungan pendidikan anak. Hal terakhir adalah memiliki jaminan keuangan keluarga yang dilihat dari kepemilikan tabungan keluarga, dan jaminan kesehatan keluarga.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

Pertama, pemberdayaan PMI Purna memiliki peran dalam menciptakan lapangan usaha. UPT-BP2MI DIY berperan dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan PMI Purna terkait edukasi keuangan, kewirausahaan, serta kerjasama kelompok sehingga dari kegiatan wirausaha yang dilakukan mampu menyerap tenaga kerja warga sekitar. UPT telah menciptakan wadah komunikasi untuk saling bertukar pikiran dan informasi bagi PMI Purna. Meskipun masih terdapat kendala yang dihadapi dalam praktek di lapangan.

Kedua, kegiatan pemberdayaan PMI Purna yang dilaksanakan UPT-BP2MI DIY

telah meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga yang menunjukkan kemampuan PMI Purna mengabsorpsi, mengadaptasi dan berhasil melakukan transformasi diri yang diukur melalui empat aspek yaitu (1). Kepemilikan tempat tinggal keluarga, (2). Pendapatan keluarga, (3). Kemampuan menyekolahkan anak sampai tidak putus sekolah, dan (4). Memiliki tabungan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto, 2012, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Anwar, Syaiful, 2020, Strategi Pemberdayaan Wilayah Pesisir Dalam Menghadapi Bencana Tsunami Serta Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah (Studi di Desa Bulakan, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Banten). *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 26, No. 1, hh. 108-131.
- Armawi, A., 2020, *Kata Kunci Ketahanan Nasional, Materi Kuliah: Teori Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: Prodi Ketahanan Nasional.
- BP2MI, 2015, *Rencana Strategis BNP2TKI 2015-2019*. Jakarta : BP2MI.
- BP2MI, 2021, *Infografis UPT-BP2MI D.I.Yogyakarta 2021*. D.I Yogyakarta : UPT-BP2MI D.I Yogyakarta.
- BP2MI, 2021, *Target dan Realisasi Kegiatan Pemberdayaan PMI Purna pada UPT-BP2MI se-Indonesia*. Jakarta : BP2MI.
- BP2MI, 2021, *Jumlah Penempatan PMI asal Provinsi D.I.Yogyakarta* [online]. (diupdate Januari 2021). <<https://www.bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pmi-periode-tahun-2020>> [diakses 15 April 2021].
- BP2MI, 2021, *Jumlah Kepulangan PMI asal Provinsi D.I.Yogyakarta* [online]. (diupdate Januari 2021). <<https://www.bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pmi-periode-tahun-2020>> [diakses 15 April 2021].
- BPS, 2016, *Katalog Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*. Jakarta : CV Lintas Khatulistiwa.
- Bungin, Burhan, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke. Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Hendriyanto, 2014, Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Desa Wisata Dan Implikasinya terhadap Ketahanan Sosial Budaya. *Jurnal Ketahanan Nasional*, hh. 49-57.
- Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan PMI, PMI Purna dan Keluarganya.
- Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
- Surat Edaran (SE) Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya
- UU Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.